

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesehatan global telah menjadi perbincangan di dalam studi Hubungan Internasional dalam kurun waktu lebih dari satu dekade ini, istilah kesehatan global menjadi istilah umum tidak hanya di kalangan ilmiah, tetapi sebagai bagian dari perdebatan kebijakan tentang bagaimana pelayanan kesehatan harus dibiayai dan diperhatikan. Istilah 'golbal' digunakan karena ruang lingkup tanggapan nasional untuk mengatasi masalah kesehatan yang semakin banyak (terutama yang memiliki implikasi lintas batas) dan telah mengalami globalisasi. Kesehatan global, dengan kata lain, telah muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan dunia yang telah mengarah pada integrasi yang lebih erat di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kesehatan (McInnes, 2012).

Pada saat yang sama, penggunaan istilah kesehatan global dapat dipahami tidak hanya sebagai cerminan dari perubahan besar dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan, tetapi sebagai konsep yang berkontribusi pada perubahan itu sendiri. Kesehatan global telah menarik perhatian komunitas akademik dan para *stakeholders*, serta masyarakat umum. Dalam dunia akademik, volume artikel, jurnal, buku dan beberapa serial buku telah menjamur selama dua dekade terakhir. Termasuk dukungan untuk peningkatan akreditasi dan pelatihan kesehatan global, yang didukung oleh badan dan asosiasi kesehatan profesional.

Dalam dunia kebijakan, para *stakeholders* menghadirkan mekanisme kelembagaan baru, rangkaian dan inisiatif yang berkembang, sehingga banyak yang secara eksplisit berorientasi 'global'. Isu kesehatan global telah menjadi sebuah keharusan, baik di Forum Ekonomi Dunia, KTT G8 atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Bank pembangunan regional dan multilateral, yang dipimpin oleh Bank Dunia, dan lembaga non-kesehatan lainnya, termasuk Majelis

Umum PBB, juga telah memberikan perhatian terhadap kesehatan global. Sektor kesehatan telah menerima bagian terbesar dari peningkatan dana bantuan sejak tahun 1990-an. Lebih jauh lagi, dalam hal kebijakan, kesehatan global telah tampil sebagai isu yang meningkat di sektor kebijakan luar negeri dan keamanan. (McInnes, 2012).

Ketika pandemi COVID-19 terjadi, isu kesehatan semakin berkembang, lagi, menyebabkan banyak penstudi HI mengkaji isu-isu kesehatan dan menghubungkannya dengan isu HI lain, mulai dari politik, ekonomi, bahkan sosial budaya. Isu kesehatan menjadi menarik untuk dibahas karena seperti yang kita ketahui, kesehatan adalah sesuatu yang mahal harganya, semua dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik apabila semua faktor di dalamnya dalam keadaan yang sehat. Isu kesehatan menjadi penting karena berkaitan dengan tingkat kualitas dan kelancaran proses pembangunan, dari masalah kebersihan, sanitasi air, intervensi gizi, hingga ketahanan pangan, semua bertujuan kepada masyarakat yang sehat demi pembangunan yang berkelanjutan.

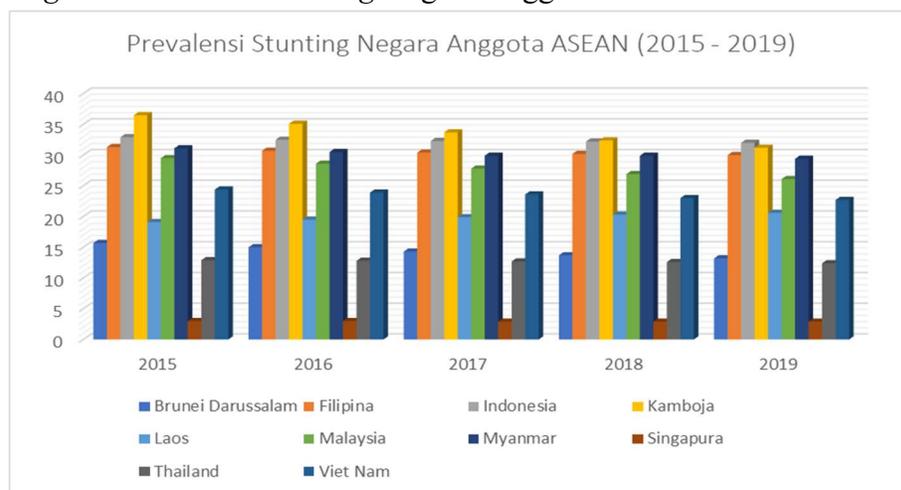
Salah satu momok dalam isu kesehatan global adalah isu *stunting*. *Stunting* merupakan salah satu isu yang sering dibahas pada abad ke-21 ini. Menurut WHO, *Stunting* merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. *Stunting* memiliki dampak fungsional yang cukup besar dan merugikan bagi seseorang yang mengalaminya. *Stunting* dapat mempengaruhi tingkat kognitif sehingga mempengaruhi pendidikan, *stunting* juga dapat mengurangi tingkat produktivitas, dan jika di kemudian hari kondisi *stunting* ini disertai dengan kenaikan berat badan yang signifikan, tingkat risiko penyakit kronis juga akan meningkat. *Stunting* diakibatkan dari ketidakcukupan nutrisi selama fase perkembangan kritis kehidupan. Karena fase ini tidak terulang kembali di kemudian hari, membalikkan atau mengobati konsekuensi perkembangan dari kekurangan gizi pada seseorang di kemudian hari hampir tidak mungkin dilakukan. *Stunting* dan konsekuensinya harus dicegah dengan memastikan akses ke nutrisi yang tepat selama 1.000 hari pertama kehidupan. Fase ini disebut sebagai *1000-days window of opportunity*, dimana periodenya adalah pada 300 hari di kandungan dan 700 hari pasca melahirkan, yang menjadi fokus utama di sini adalah bagaimana

peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terutama bagi perkembangan fisik, dan otak sang anak ketika dalam masa kandungan.

Permasalahan *stunting* merupakan masalah yang ingin diatasi oleh negara-negara di dunia. Aktor-aktor negara dan organisasi-organisasi internasional yang memiliki fokus yang sama terkait hal ini sedang berusaha untuk mengurangi angka penderita *stunting*. Mengapa *stunting* ini menjadi hal yang penting untuk diatasi dan apa dampak yang ditimbulkan terutama terkait dengan pembangunan menjadi alasan Penulis ingin melakukan penelitian ini, khususnya di Indonesia. Di era modernisasi seperti saat ini, persaingan semakin ketat, meluas, dan semakin *borderless* menuntut masyarakat untuk selalu berpacu dengan zaman, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian yang berguna untuk bahan refleksi bahwa *stunting* memang harus diberikan perhatian lebih.

Di abad ke-21 ini, banyak negara-negara terutama negara dunia ketiga atau negara berkembang yang berusaha untuk mengurangi tingkat *stunting* yang terjadi di negaranya. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, tingkat prevalensi *stunting* terbilang cukup tinggi, khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN, dimana negara seperti Filipina, Kamboja, Myanmar dan Indonesia memiliki tingkat prevalensi *stunting* hingga 30% dari total jumlah anak balita di masing-masing negara.

Figur 1. Prevalensi *Stunting* Negara Anggota ASEAN 2015-2019



Sumber : *Joint Child Malnutrition Estimates (JME), 2021*

Di Indonesia sendiri, dalam rapat koordinasi pelaksanaan operasional program (RAKORPOP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 yang salah satunya membahas tentang ketahanan dalam *Sustainable Development Goals*, di tahun 2030 Indonesia diharapkan mampu mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia. Kemudian, munculnya kebijakan Stranas *Stunting*, yang dimana berusaha untuk mencegah anak kelahiran 2018-2022 dari *stunting*. Stranas *Stunting* bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) untuk ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun.

Tabel berikut menunjukkan prevalensi *stunting* nasional berdasarkan provinsi dengan skala nasional Indonesia sebesar 27,3 persen pada tahun 2019. Dapat dilihat lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi *stunting* melebihi dari angka nasional. Lima (5) provinsi yang mempunyai angka prevalensi *stunting* tertinggi di atas angka

Figur 2. Prevalensi *Stunting* di Indonesia Tahun 2019 (Berdasarkan Provinsi)



Sumber : Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019

nasional yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (43,7%), Sulawesi Barat (39,3%), Nusa Tenggara Barat (36,8%), Gorontalo (35,1%) dan Aceh (33,6%). Lima (5) provinsi yang mempunyai angka prevalensi *stunting* di bawah angka nasional yaitu Provinsi Bali (14,3%), Kepulauan Riau (16,3%), Kepulauan Bangka Belitung (19,9%), DKI Jakarta (19,9%), dan Jambi (20,8%).

Selain dengan program yang sudah dibentuk, pemerintah Indonesia juga turut menjadi anggota dari sebuah kerangka kerjasama yang bergerak dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan *stunting* yaitu *Scaling Up Nutrition* (SUN) *Movement* yang merupakan upaya global dalam rangka memperkuat komitmen sebagai wujud percepatan perbaikan gizi.

Gerakan *Scaling Up Nutrition* (SUN) merupakan sebuah upaya penghapusan segala bentuk kekurangan gizi, berdasarkan prinsip bahwa setiap orang berhak atas pangan dan nutrisi yang baik. Gerakan ini membawa kelompok aktor yang berbeda-beda mulai dari aktor pemerintah atau negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, donor, pebisnis dan ilmuwan dalam aksi kolektif untuk bersama-sama meningkatkan nutrisi. *SUN Movement* merupakan sebuah gerakan untuk memperkuat komitmen dan pertanggungjawaban atas peningkatan kualitas gizi secara global dengan cara memberdayakan para aktor untuk menerapkan sistem yang efektif dan meningkatkan investasi khususnya investasi gizi. *SUN Movement* bekerja untuk mencapai pengurangan gizi buruk yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas gizi secara global. *SUN Movement* sendiri didasarkan pada kerangka yang disepakati untuk Aksi Meningkatkan Nutrisi pada tahun 2010. Dr David Nabarro, Perwakilan Khusus untuk Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, diangkat sebagai Koordinator *SUN Movement* dan mendirikan Sekretariat *SUN Movement* di Jenewa. Pada akhir 2010, empat negara telah menunjukkan niat mereka untuk meningkatkan nutrisi. Jumlahnya telah meningkat menjadi 24 di akhir 2011 dan sekarang berjumlah 61 negara yang mayoritas berasal dari wilayah Afrika.

Untuk menunjang penelitian yang dilakukan Penulis tentang **KERJASAMA INDONESIA DAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM**

UPAYA PENURUNAN TINGKAT PREVALENSI *STUNTING* DI INDONESIA MELALUI GERAKAN *SCALING UP NUTRITION* (SUN) PERIODE 2013-2021

Penulis melakukan peninjauan terhadap studi pustaka penelitian sebelumnya agar Penulis dapat mengetahui nilai signifikansi penelitian Penulis juga untuk menjelaskan bagaimana upaya *SUN Movement* dalam menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di berbagai negara.

Penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan *SUN Movement* dan *stunting* baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai awalan Penulis menggunakan sebuah jurnal yang berjudul **Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus *Stunting* Di Indonesia** yang ditulis oleh Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri dimana disebutkan dalam proses penyelesaian masalah *stunting* di Indonesia, dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat, termasuk arah, tujuan dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan kualitas gizi individu dan masyarakat. Ada empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu: 1) Memperbaiki pola konsumsi pangan berbasis gizi seimbang; 2) Meningkatkan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; 3) Meningkatkan ketersediaan dan mutu pelayanan gizi berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Meningkatkan sistem kesadaran pangan dan gizi. Kemudian Undang-Undang No. 18 tentang Pangan Tahun 2012 menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan, dan mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun sekali.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres tersebut didasarkan pada agenda Sustainable Development Goals (SDG) yang diusung oleh negara-negara maju bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPB/SDGs sebenarnya bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan mengelola tata kelola yang dapat menjaga kualitas hidup setiap generasi. Percepatan upaya perbaikan gizi merupakan bagian penting dari tujuan kedua TPB, yaitu memutus rantai kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, menyediakan akses gizi yang lebih baik, dan mendukung berbagai kegiatan pertanian secara berkelanjutan. Mengacu pada kebijakan pengawasan dan pembangunan presiden yang dijelaskan di Bappenas, *stunting* menjadi prioritas nasional Indonesia. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya intervensi gizi sudah ada sejak satu dekade terakhir, dan Indonesia secara aktif berusaha untuk menekan angka kelaparan dan malnutrisi demi pembangunan yang berkelanjutan (Situmeang & Putri, 2021)

Sebuah analisis implementasi kerangka *Scaling Up Nutrition* di Vietnam, yang berjudul **The cost of implementing Vietnam's national plan of action for nutrition for 2017–2020** yang ditulis oleh Hoang Van Minh. Pada tahun 2014, Pemerintah Vietnam bergabung dengan Gerakan *Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan komitmen sukarela untuk memprioritaskan kegiatan gizi sebagai bagian dari agenda nasional mereka. Penetapan biaya dan pelacakan investasi nutrisi memainkan peran penting dalam siklus perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan untuk memprioritaskan sumber daya dan upaya untuk fase yang akan datang (2017–2020) di Vietnam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat lintas sektor untuk mengintegrasikan program gizi secara penuh ke dalam semua upaya pembangunan. Hal ini membutuhkan kerja sama dan dukungan yang erat lintas kementerian, dan dengan donor, badan-badan PBB, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan bisnis. Hal ini akan ditingkatkan lebih jauh dengan kepemimpinan politik yang kuat di tingkat tertinggi untuk meningkatkan status gizi penduduk.

Dalam *National Plan of Action for Nutrition* (NPAN) 2011–2015, penetapan biaya intervensi sensitif gizi tidak sepenuhnya terintegrasi dan akibatnya, terbukti sulit untuk melacak kontribusi sektor lain terhadap program gizi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan penetapan biaya NPAN 2017–2020 yang

mencakup tindakan spesifik nutrisi, sensitif nutrisi, dan tata kelola. Estimasi biaya harus mencukupi anggaran yang dibutuhkan Pemerintah Vietnam untuk mencapai target nutrisi yang ditetapkan dalam NPAN 2017–2020.

Vietnam merepresentasikan strategi nutrisi yang diprioritaskan pada tindakan yang sensitif nutrisi, serupa dengan sebagian besar negara anggota Gerakan SUN seperti Bangladesh dan juga Indonesia. Dalam hal intervensi gizi khusus, Vietnam menghabiskan 7,0% dari pengeluaran publik dan 4 di antara negara-negara dengan pengeluaran terendah untuk intervensi gizi khusus. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam Gerakan SUN, angka Vietnam sedikit lebih tinggi dari Indonesia (4,3%) dan Bangladesh (3,6%) dan jauh lebih rendah dari Nepal (40,1%). Terlepas dari alokasi 27,8% dari anggaran khusus gizi untuk meningkatkan status gizi mikro, kekurangan gizi mikro masih menjadi masalah gizi yang persisten bagi Vietnam. Ini menyiratkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan kualitas program intervensi dan pendanaan untuk program terkait (Minh, 2019).

Di antara tujuan yang sensitif terhadap nutrisi, program yang terkait dengan air & sanitasi dan kesehatan ibu juga berlangsung dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan beberapa tindakan nyata dan sumber dana yang berlipat ganda telah dialokasikan untuk kedua tujuan ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa anggaran untuk peka gizi berasal dari anggaran terbesar untuk air dan sanitasi (29%) dan kesehatan ibu & reproduksi (16%) untuk periode 2017–2020. Akar dari fenomena ini adalah kesadaran dan penerimaan masyarakat akan perlunya pembangunan di bidang air & sanitasi dan kesehatan ibu. Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait gizi (misalnya, departemen gizi nasional, SUN, dll) mungkin lebih berupaya untuk meningkatkan kesadaran gizi bagi pemangku kepentingan masyarakat lainnya. Program peka nutrisi sangat menjanjikan untuk mendukung perbaikan nutrisi dan meningkatkan skala, cakupan, dan manfaat dari tindakan spesifik nutrisi. Investasi dalam program yang peka terhadap gizi dapat memiliki peran penting dalam pengurangan *stunting*, *wasting*, dan gangguan perkembangan anak yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya oleh peningkatan intervensi khusus gizi.

Ringkasnya, berinvestasi dalam mengakhiri kekurangan gizi adalah salah satu langkah paling hemat biaya yang dapat diambil pemerintah di mana setiap \$1 yang diinvestasikan dalam program nutrisi terbukti menawarkan manfaat senilai \$16. Namun, gizi memiliki beberapa faktor penentu yang mendasari dan solusi untuk mengatasi beban ganda malnutrisi adalah dengan menggunakan anggaran publik dengan cara yang hemat biaya dengan perencanaan anggaran yang cermat sejak awal. Intervensi gizi seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan permintaan produksi pangan atau beberapa intervensi spesifik gizi yang terbukti tetapi konsentrasi harus dibayar untuk kerjasama multisektor yang dapat memungkinkan lingkungan yang lebih baik untuk status gizi masyarakat umum. Berinvestasi di sektor sensitif nutrisi seperti pertanian, kesehatan dan perlindungan sosial; air, sanitasi dan kebersihan serta kesetaraan gender dapat membantu mengatasi 80% masalah *stunting*. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah di sektor-sektor ini harus menyadari bahwa nutrisi adalah tanggung jawab bersama, investasi yang tepat untuk nutrisi, dan bekerja secara terpadu.

Penelitian lain ditulis oleh Jenny Ruducha, dkk, sebuah jurnal yang berjudul **Multisectoral Nutrition Planning In Nepal: Evidence From An Organizational Network Analysis** yang berusaha menjelaskan perkembangan program kerangka kerjasama multisektor di bidang kesehatan khususnya intervensi gizi di Nepal. Karena kepemimpinan Nepal dalam perencanaan gizi multisektoral mendapatkan pengakuan global, menjadi lebih penting untuk secara sistematis mengidentifikasi pendorong keberhasilan dan kelemahan pengembangan dan implementasi Multi-Sector Nutrition Program (MSNP). Studi ini mengkaji struktur dan dinamika hubungan dari jaringan nutrisi multisektoral dalam mengembangkan MSNP pertama di Nepal. National Planning Commission (NPC) dan National Nutrition and Food Security Secretariat (NNFSS) yang mendukung NPC sebagai Sekretariat untuk implementasi MSNP adalah struktur koordinasi dan tata kelola yang sah untuk dialog, perencanaan, dan implementasi kebijakan.

Posisi sentral mereka dalam jaringan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran kepemimpinan dalam pengelolaan MSNP. Lokasi NPC di bawah kantor Perdana Menteri memberikan pengaruh untuk kolaborasi multisektoral dengan pemerintah karena mereka menyetujui rencana tahunan setiap kementerian lini. Hubungan langsung tingkat tinggi, seperti yang digambarkan oleh ukuran intensitas hubungan Organizational Network Analysis (ONA), menciptakan platform yang kuat untuk koordinasi dan kolaborasi. Jaringan Nepal yang terhubung secara padat merupakan keuntungan karena penelitian telah menunjukkan efisiensi difusi informasi yang lebih besar ke semua anggota jaringan bila dibandingkan dengan kelompok yang jarang terhubung.

Penelitian ini juga mengemukakan tantangan dalam struktur jaringan dan pola hubungan. Organisasi-organisasi dalam jaringan cenderung mengelompok berdasarkan tipe mereka sendiri seperti badan-badan PBB dan kementerian pemerintah. Temuan ini sesuai dengan prinsip homofili jaringan di mana orang dan organisasi dengan karakteristik yang sama cenderung bersatu. Lebih sulit untuk mencapai kolaborasi multisektoral ketika organisasi dengan sifat yang sama membentuk kelompok atau kelompok di antara mereka sendiri dan tidak membangun koneksi di antara kelompok yang berbeda (Ruducha, 2020)

Tantangan besar lainnya adalah bahwa kementerian, dengan pengecualian Ministry of Health and Population (MoHP), memiliki hubungan langsung yang bervariasi di antara mereka sendiri atau dengan donor, badan-badan PBB dan LSM. Ministry of Education (MoE), Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) dan Ministry of Urban Development (MoUD) mengandalkan Ministry of Agriculture Development (MoAD) untuk memainkan peran menjembatani yang penting dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan perencanaan strategis MSNP sedangkan MoE memainkan peran yang lebih besar dalam implementasi dan peningkatan MSNP. Pada bagian nutrisi, UNICEF memainkan peran yang konsisten dalam menghubungkan badan-badan PBB lainnya yang tidak memiliki hubungan langsung ke dalam jaringan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Richmond Aryeetey yaitu sebuah Jurnal berjudul **Optimism for the UN Proclamation of the Decade of Action on Nutrition: An African Perspective** yang membahas tentang Proklamasi Majelis Umum PBB dengan jelas mengidentifikasi kerangka kerja di mana situasi malnutrisi dapat diatasi dalam 10 tahun ke depan. Namun, dalam kasus khusus Afrika, masih banyak hal yang harus diperhatikan, karena faktanya masih banyak hal-hal yang ‘hilang’ dan perlu dicari jalan keluarnya. Pertama, orang Afrika harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kekurangan gizi di Afrika. Ada banyak investasi di bidang nutrisi di Afrika. Apa yang hilang adalah kepemimpinan oleh orang Afrika untuk membuat investasi bekerja untuk situasi Afrika. Lebih banyak kemajuan akan dicapai jika pemerintah Afrika telah cukup memprioritaskan nutrisi dan menyediakan komitmen keuangan yang berkelanjutan dan memadai dari perbendaharaan mereka untuk mengatasi kekurangan gizi. Hal ini terutama diperlukan ketika terlalu banyak negara yang berada di luar jalur dalam memenuhi target nutrisi global berada di Afrika. Komitmen tersebut harus dipadukan dengan proses yang kuat untuk memastikan akuntabilitas pencapaian target yang realistis tetapi cukup ambisius untuk mengatasi kekurangan gizi dalam segala bentuk.

Kedua, penelitian ini juga berusaha memahami determinan dan karakteristik malnutrisi; dalam beberapa kasus, agenda penelitian didorong dari luar Afrika dan tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan Afrika. Kesenjangan utama yang menunggu untuk diisi adalah para ilmuwan Afrika menggunakan pendekatan sistematis untuk menghasilkan opsi kebijakan untuk pengambilan keputusan. Satu dekade terlalu singkat untuk melakukan lebih banyak hal yang sama: analisis dan tinjauan situasi gizi. Sumber daya yang tersedia akan paling baik digunakan dalam penerapan teknologi nutrisi spesifik dan sensitif nutrisi yang sudah terbukti, termasuk biofortifikasi bahan pokok yang biasa dikonsumsi, mempromosikan keragaman makanan, suplementasi mikronutrien ganda, dan meningkatkan program jaring pengaman sosial untuk yang paling rentan di masyarakat.

Ketiga, pemerintah harus didorong, melalui gerakan *grassroot* seperti jaringan masyarakat sipil SUN, untuk berinvestasi lebih banyak dalam nutrisi daripada yang mereka lakukan saat ini. Pola pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan di negara-negara miskin sumber daya akan habis dengan cepat tanpa pemerintah berinvestasi untuk mengkonsolidasikan keuntungan yang dapat diperoleh.

Pada intinya, lebih banyak upaya harus diinvestasikan dalam mempromosikan kolaborasi di berbagai pemangku kepentingan di kawasan Afrika. Pengalaman lintas negara dan berbagi praktik terbaik dapat meningkatkan kemajuan yang lebih cepat dan mengurangi biaya implementasi program. Di dalam negara, diperlukan lebih banyak kolaborasi lintas lembaga dan lintas sektor (pemerintah, donor, masyarakat sipil, peneliti, dan lembaga seperti PBB) (Aryeetey, 2016).

Penelitian selanjutnya yang Penulis gunakan yaitu sebuah jurnal yang berjudul **Contribution of scaling up nutrition Academic Platforms to nutrition capacity strengthening in Africa: local efforts, continental prospects and challenges** yang ditulis oleh Amos K. Laar, dkk pada Prosiding Nutrition Society (2017) yang membahas tentang The Ghana SUN Academic Platform (AP) yaitu sebuah jaringan akademik lokal di Ghana dengan tujuan berkontribusi pada peningkatan gizi di Ghana. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk berkontribusi pada penguatan kapasitas di semua sektor terkait di Ghana. AP menyadari bahwa kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan nutrisi yang ada bervariasi di seluruh rangkaian, institusi dan sektor. Oleh karena itu SUN AP hadir untuk memperkuat kapasitas nutrisi dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. SUN AP dimulai pada tahun 2012 oleh akademisi yang terlibat dalam pembentukan SUN *Movement* di tingkat global. Para akademisi ini menyadari kebutuhan ahli gizi yang belum terpenuhi untuk meningkatkan agenda SUN. Pada tahun 2015 AP terdaftar sebagai organisasi nirlaba dengan kantor Panitera Jenderal di Ghana. AP diundang untuk menyediakan layanan penyusunan dokumen untuk kelompok perencanaan gizi (CSPG) lintas sektoral SUN.

Selanjutnya, Global SUN AP juga tergabung dalam gerakan SUN sebagai Academia Subcommittee dan memiliki mandat untuk memfasilitasi pelibatan

komunitas ilmiah untuk mendukung gerakan SUN. Hal ini dicapai melalui manajemen pengetahuan, pengembangan kapasitas dan bantuan teknis seperti yang dipersyaratkan oleh negara-negara SUN. Di tingkat negara, AP bertindak sebagai katalis untuk menyatukan tim sumber daya, organisasi, dan jaringan di tingkat regional, subregional atau lokal untuk mengatasi kesenjangan dan hambatan suatu negara yang bersangkutan untuk mengakhiri kekurangan gizi melalui rekomendasi dan rencana aksi yang nyata. Agenda untuk meningkatkan kapasitas nutrisi di Ghana SUN AP melaksanakan beberapa tugas yaitu; Mengintegrasikan kompetensi keilmuan dan informasi untuk komunikasi yang bermanfaat dalam gerakan SUN; Membangun konsensus tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pendidikan profesional yang membahas isu-isu yang terkait dengan gerakan SUN; Mendiskusikan proposal global pengembangan kompetensi di daerah, memfasilitasi komunikasi regional untuk membangun konsensus dan mendukung aksi regional yang terkoordinasi; Standarisasi proses menghasilkan layanan yang bermanfaat baik untuk kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam agenda Gizi menyeluruh yang relevan dengan gerakan SUN; Mengidentifikasi hambatan dalam partisipasi akademisi untuk berkontribusi pada gerakan SUN dan memfasilitasi strategi untuk mengurangi faktor penghambat tersebut; Menggunakan informasi yang relevan dari kelompok negara itu sendiri dalam melatih pelatih untuk pengembangan kapasitas yang berharga dan jaringan internal dengan cabang lain dari gerakan SUN.

Gerakan SUN dan komitmen politik yang dihasilkannya dipandang dapat menawarkan harapan besar bagi keterlibatan multi-sektor tingkat negara dan regional. Enam tahun setelah pendiriannya, *SUN Movement* diakui secara global sebagai inisiatif penting. Negara-negara anggota *SUN Movement* harus menunjukkan kebijakan dan lingkungan hukum yang kondusif untuk SUN dan memiliki platform koordinasi multi-sektor. SUN AP, melihat komitmen ini sebagai peluang juga sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang memberikan inspirasi untuk mengatasi tantangan malnutrisi (Laar, 2017).

Selanjutnya merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Ann Louise Lie dan juga Sabrina Ionata Granheim yang berjudul **Multistakeholder partnerships in global nutrition governance: protecting public interest?** Di dalam artikel ini mengkritisi kehadiran *SUN Movement* dimana Kemitraan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil dan aktor sektor privat telah menjadi instrumen utama dalam tata kelola pangan dan gizi dan untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara kemitraan dapat memberikan solusi efektif untuk masalah kebijakan dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya dari pemangku kepentingan yang berbeda, tingkat keterlibatan aktor yang kepentingannya bertentangan, atau mungkin tampak bertentangan, dengan agenda lembaga publik harus dibatasi. Bisnis yang keuntungannya bergantung pada pemasaran dan penjualan makanan dan minuman yang tidak sehat, misalnya, dapat membingkai ulang masalah malnutrisi untuk kepentingan mereka sendiri (misalnya sebagai akibat dari perilaku individu saja), memengaruhi agenda dan prioritas kesehatan masyarakat, mendanai penelitian yang tampaknya mendukung pandangan mereka, dan mengganggu proses legislatif untuk menggagalkan regulasi industri. Pengaruh yang tidak semestinya tersebut mungkin dapat diatasi melalui pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan yang lebih efektif. Untuk mengeksplorasi topik ini, penelitian ini membahas peran dan kegiatan masing-masing Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Gerakan *Scaling Up Nutrition* (Gerakan SUN) dalam memberikan panduan normatif bagi pemerintah tentang bagaimana melindungi kebijakan gizi dari pengaruh yang tidak semestinya.

Melalui pengesahan “Rencana implementasi komprehensif tentang gizi ibu, bayi dan anak kecil” oleh Negara-negara Anggota di Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2012, WHO diberi mandat untuk 'membentuk aliansi dan kemitraan untuk memperluas tindakan gizi dengan pembentukan mekanisme yang memadai untuk melindungi terhadap potensi konflik kepentingan'. Negara-negara Anggota juga mengamanatkan WHO untuk 'mengembangkan penilaian risiko, pengungkapan, dan alat manajemen untuk melindungi dari kemungkinan konflik kepentingan dalam

pengembangan kebijakan dan implementasi program nutrisi yang konsisten dengan kebijakan dan praktik WHO secara keseluruhan'. Sejak itu, WHO telah mengadopsi kebijakan untuk memandu keterlibatannya dengan aktor non-negara dan saat ini bekerja untuk mengembangkan panduan bagi negara-negara tentang pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan dalam proses kebijakan gizi. Pedoman tersebut akan dipresentasikan di Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2018.

Berbeda dengan WHO, *SUN Movement* bukanlah badan khusus PBB yang berperan menjalankan fungsi normatif dan analitis yang diamanatkan oleh Negara Anggota. Sebaliknya, Gerakan SUN memiliki peran yang ditunjuk sendiri untuk mengkoordinasikan pelaku gizi di tingkat global, mengadvokasi dan memobilisasi dana untuk gizi, dan mendukung tindakan tingkat negara di bidang malnutrisi. Salah satu tujuan utamanya adalah membangun kemitraan multi-stakeholder untuk nutrisi di negara-negara anggotanya. Keterlibatan erat perusahaan makanan dalam kemitraan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepentingan siapa yang dipromosikan melalui Gerakan SUN. Melalui Jaringan Bisnisnya, 268 perusahaan telah berkomitmen untuk mendukung upaya negara-negara untuk meningkatkan aksi nutrisi (Lie & Granheim, *Multistakeholder partnerships in global nutrition governance: protecting public interest?*, 2017)

Pada tahun 2013, Gerakan SUN mulai mengembangkan pedoman bagi negara-negara anggotanya tentang cara mengatasi konflik tersebut. Panduan, "Reference Note and a Toolkit for Preventing and Managing Conflicts of Interest", dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation, dan dikembangkan oleh sebuah perusahaan konsultan privat. Panduan ini telah disebarluaskan di 61 negara anggota Gerakan SUN dan saat ini digunakan oleh para anggotanya, termasuk Jaringan Bisnis, untuk memandu upaya pemerintah mengatasi konflik kepentingan saat mengembangkan kebijakan dan program gizi mereka. Penelitian ini khawatir tentang niatnya, kontennya, dan kemungkinan campur tangannya dengan peran rangkaian norma WHO.

Penelitian Selanjutnya ditulis oleh Amanda Coile, dkk yaitu sebuah Jurnal yang berjudul **Scaling Up Nutrition Through Multisectoral Planning: An Exploratory**

Review Of 26 National Nutrition Plans. Penilaian ini didasarkan pada tinjauan kualitatif dari pilihan MSNP nasional negara-negara anggota SUN (rencana gizi multisektoral). Ditugaskan oleh Sekretariat Gerakan SUN (SMS), tinjauan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada Sekretariat untuk mendukung perencanaan negara SUN. Rencana diprioritaskan untuk ditinjau oleh SMS berdasarkan (1) jika dikembangkan antara 2014 dan 2020, (2) jika masih aktif dan aktif pada saat peninjauan, dan (3) jika dapat diakses.

Penilaian didasarkan pada Daftar Periksa Gerakan SUN tentang kriteria dan karakteristik rencana gizi nasional yang 'baik'. Daftar Periksa dikembangkan oleh Jaringan PBB untuk SUN dan SMS, bersama dengan sekelompok ahli di berbagai bidang kebijakan. Daftar Periksa disusun di sekitar lima bidang umum yang dianggap sebagai dasar dari MSNP nasional termasuk (1) analisis situasi dan tinjauan kebijakan/pemrograman, (2) keterlibatan pemangku kepentingan dan komitmen politik, (3) kerangka biaya dan anggaran, (4) rangkaian pelaksanaan dan pengelolaan, dan (5) pemantauan, evaluasi, penelitian dan tinjauan operasional—yang masing-masing dibagi lagi menjadi dua hingga enam kriteria, sehingga menghasilkan total 17 kriteria. Selain itu, setiap kriteria mencantumkan beberapa karakteristik khusus. Namun, Daftar Periksa mengakui bahwa ini secara umum bersifat umum dan tidak menentukan untuk memfasilitasi pertimbangan dan adaptasi lintas konteks negara.

Dalam upaya global untuk meningkatkan gizi untuk semua, kepemilikan dan kepemimpinan pemerintah dalam mengadopsi MSNP nasional sangat penting. Perencanaan, pembiayaan, dan peningkatan intervensi gizi multisektoral saat ini—lebih dari sebelumnya—sangat penting untuk melindungi pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam memerangi segala bentuk malnutrisi dan pencapaian di seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk tujuan ini, meskipun tinjauan ini menunjukkan atribut dan area yang kuat untuk pertumbuhan dalam MSNP negara SUN. panduan lebih lanjut tentang proses perencanaan gizi multisektoral dapat mendukung operasionalisasi yang lebih efektif dari rencana ini. Temuan dari tinjauan ini memberikan landasan penting untuk menginformasikan area untuk penelitian lebih

lanjut dan di mana panduan tambahan tersebut mungkin bermanfaat. Misalnya, eksplorasi lebih lanjut ke dalam kesenjangan kunci yang teridentifikasi seputar mitigasi risiko dan perencanaan darurat, analisis keuangan, dan perencanaan operasional yang terperinci akan menjadi sangat penting. Temuan ini juga dapat berfungsi sebagai dasar penting untuk mempertimbangkan kemajuan dalam perencanaan gizi multisektoral di seluruh negara.

Secara lebih luas, meskipun tinjauan ini tidak dapat mengomentari keberhasilan dan dampak rencana yang ditinjau dalam mengurangi malnutrisi dan membangun lingkungan yang mendukung nutrisi yang kuat, literatur sebelumnya telah menyarankan hubungan antara keberadaan MSNP nasional dan bukti lain dari komitmen institusional terhadap nutrisi, dan hasil nutrisi. Misalnya, setelah penyusunan rencana strategis gizi multisektoral mereka, Burkina Faso melanjutkan upaya operasionalisasi, yang mengarah pada pembuatan garis anggaran gizi dan pembentukan sekretariat teknis gizi untuk memimpin pelaksanaan gizi. Di Nepal, MSNP mereka mengarah pada perbaikan dalam koordinasi, advokasi dan struktur berkelanjutan untuk aksi nutrisi. Meskipun pencapaian tersebut tidak universal di seluruh negara, dan kedua negara mungkin masih menghadapi hambatan tertentu, kemajuan positif ini menunjukkan potensi pentingnya memiliki MSNP untuk mempercepat upaya mengurangi kekurangan gizi (Coile, 2021)

Tinjauan ini berfungsi sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut yang menilai sejauh mana penyertaan (atau pengecualian) karakteristik tertentu dalam suatu rencana berkontribusi pada operasionalisasi yang efektif dan dampak dari suatu rencana yang sangat penting untuk menginformasikan lebih lanjut perencanaan gizi multisektoral yang efektif. Kerangka tinjauan juga dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kesenjangan di MSNP selama pengembangan rencana atau pada pertengahan pelaksanaan untuk memfasilitasi perbaikan, mendorong dialog tentang kesenjangan dan kebutuhan dukungan, atau bertindak sebagai mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan operasional pada mengatasi malnutrisi berdasarkan rencana negara.

Melangkah ke depan dan memasuki dunia pasca-COVID-19, kapasitas negara-negara SUN untuk terus mengembangkan, memprioritaskan, dan menerapkan MSNP nasional dengan cara yang hemat biaya akan menjadi vital. Temuan dari analisis ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan saat ini dan di masa depan, penyedia bantuan teknis, dan pemangku kepentingan regional dan global untuk memajukan perencanaan, penganggaran dan implementasi gizi multisektor menuju lingkungan yang kondusif dan memungkinkan untuk perbaikan gizi.

Penelitian selanjutnya yang Penulis gunakan yaitu sebuah jurnal yang berjudul **Power in Global Nutrition Governance : A Critical Analysis of the Establishment of the Scaling Up Nutrition (SUN) Partnership** yang ditulis oleh Ann Louise Lie dari Pusat Pengembangan dan Lingkungan Universitas Oslo yang membongkar politik relasi kekuasaan yang timpang di mana Artikel ini memberikan komentar tentang pengembangan GPPP, menunjukkan bagaimana GPPP sebagai bentuk tata kelola global yang sangat politis. GPPP sendiri adalah *global public-private partnership* mengingat bagaimana SUN dibangun dan menunjukkan bagaimana aktor negara dan non-negara menjalankan kekuasaan instrumental, struktural, dan diskursif di balik layar. Namun, aktor non-negara khususnya sektor privat atau privat memberikan keseimbangan yang hanya menguntungkan mereka sendiri, karena mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengembangkan SUN menjadi GPPP yang secara efektif mengesampingkan struktur nutrisi PBB yang ada, serta suara masyarakat sipil yang kritis. Lie menyebutkan bahwa selama proses penciptaan SUN, berbagai bentuk kekuatan jelas bermain, tumpang tindih dan saling memperkuat dengan cara yang kompleks.

Perkembangan menunjukkan bagaimana kekuatan instrumental memainkan peran yang sangat signifikan, memungkinkan koalisi investasi mikronutrien untuk menggunakan kekuatan struktural dan diskursif untuk memajukan agendanya. Aktor dalam koalisi investasi menjalankan kekuatan instrumental ketika mereka menggunakan sumber daya keuangannya untuk melobi para pembuat keputusan dan untuk menyewa konsultan yang memajukan kepentingannya. Secara tidak langsung,

kekuatan instrumentalnya memungkinkannya memperoleh kekuatan struktural, karena menarik dana yang sangat dibutuhkan dari UNSCN (United Nations System Standing Committee on Nutrition), yang akhirnya mengarah pada reformasinya. Dengan menggunakan kekuatan instrumental, koalisi investasi juga memperkuat kekuatan diskursifnya karena mendanai penelitian berpengaruh yang membentuk persepsi tentang intervensi nutrisi yang “tepat” dan tanggapan tata kelola sejalan dengan agendanya.

Sementara SUN menggambarkan dirinya sebagai upaya yang dipimpin oleh negara, negara-negara berkembang hanya sedikit terlibat dan memiliki sedikit pengaruh terhadap pendiriannya. SUN dari waktu ke waktu menjadi inklusif bagi negara-negara berkembang; namun, aktor kuat dari koalisi investasi masih mendominasi tata kelolanya. Memang, seperti yang disarankan oleh para kritikus, SUN tentu saja telah membuka ruang bagi pengaruh sektor privat dalam tata kelola nutrisi global dan saat ini berkontribusi pada promosi solusi berbasis pasar dan teknologi untuk masalah nutrisi (Lie, 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai upaya dalam menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia yang didukung dengan fakta data masih tingginya angka tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia dan menimbanginya sebagai salah satu pilar pembangunan seperti yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Indonesia melaksanakan proses kerjasama multisektor dengan *framework* yang diberikan oleh PBB melalui SUN *Movement*. Mengingat keanggotaan Indonesia di dalam SUN *Movement* yang sudah terlampau cukup lama yaitu semenjak 2011, Penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu **Bagaimana upaya kerja sama antara Indonesia dan PBB melalui SUN *Movement* dalam menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia khususnya pada periode 2013-2021?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjelaskan peran dari SUN *Movement* dalam upayanya menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia.

1.3.1 Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas upaya kerja sama antara Indonesia dan PBB melalui SUN *Movement* dalam upaya menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia. Harapan Penulis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi lebih terkait dengan upaya penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia serta memberikan rujukan lebih terkait dengan kebijakan yang kemudian akan diambil untuk mengatasi masalah *stunting* tersebut.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan kajian studi Hubungan Internasional khususnya yang terkait dengan isu kesehatan yaitu *stunting*, yang hingga saat ini sedang diperangi secara global dan utamanya memberikan pemahaman lebih terhadap penanganan *stunting* di Indonesia sendiri yang masih memiliki angka tingkat prevalensi *stunting* cukup tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan baik untuk akademisi ataupun para pemangku kebijakan, mengingat penelitian ini berfokus pada salah satu pilar utama pembangunan Indonesia yaitu pembangunan manusia. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan isu *stunting* di masyarakat luas sehingga perwujudan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan Penulis berusaha menguraikan masalah yang Penulis pilih melalui latar belakang masalah, merumuskan masalah, dan menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian ini, juga menjabarkan sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka Penulis menyebutkan dan menjelaskan studi literatur yang Penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menjabarkan kerangka berfikir dan alur pemikiran yang akan digunakan oleh Penulis.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian Penulis menguraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rancangan waktu penelitian.

Bab IV: Kondisi dan Perkembangan *Stunting* serta Keberadaan *SUN Movement* di Indonesia.

Pada Bab ini Penulis akan menjabarkan kondisi dan perkembangan *stunting* dalam skala global serta bagaimana *SUN Movement* berperan dalam upayanya untuk mengurangi tingkat prevalensi *stunting* di dunia internasional. Secara terpisah, Penulis juga akan menjelaskan bentuk kerja sama yang dilakukan *SUN Movement* di Indonesia.

Bab V : Analisis Implementasi Kerangka Kerjasama *SUN Movement* di Indonesia

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan bagaimana proses implementasi kerangka kerjasama *SUN Movement* dan implikasinya terhadap upaya penurunan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Pada bab kesimpulan Penulis akan menarik konklusi dari penelitian yang sudah Penulis laksanakan dan memberikan saran terkait peran *SUN Movement* dalam upaya menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia.